

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
DANA DESA DI DESA PRONOJIWO, KECAMATAN PRONOJIWO,
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

Muhimmatul Ulya Imrona

NIM: G92219103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Muhimmatul Ulya Imrona, G92219103, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 04 Juli 2023



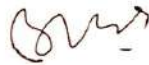
Muhimmatul Ulya Imrona
NIM. G92219103

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 13 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Dr. Imam Buchori, SE., M.Si., CITAP

NIP. 196809262000031001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA PRONOJIWO, KECAMATAN
PRONOJIWO, KABUPATEN LUMAJANG**

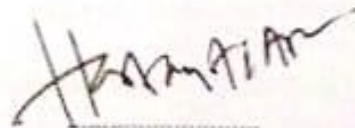
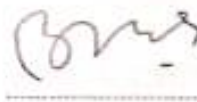
Oleh
Muhimmatul ulya Imrona
NIM: G92219103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Imam Buchori, SE., M.Si., CITAP
NIP. 196809262000031001
(Penguji 1)
2. Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA,
BKP
NIP. 198308082018012001
(Penguji 2)
3. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A., CSRS.
NIP. 199110012019032020
(Penguji 3)
4. Mochammad Ilyas Junjuran, SE., MA.
NIP. 199303302019031009
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 10 Juli 2023



Muhammad Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhimmatul Ulya Imrona
NIM : G92219103
Fakultas/Jurusan : Akuntansi
E-mail address : muhimmatululya141@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2023

Penulis

(Muhimmatul Ulya Imrona)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 70, yang diperoleh melalui metode saturaton sampling atau sampel jenuh pada seluruh aparatur desa dan Ketua RT dan Ketua RW sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda pada software SPSS 29.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Hasil penelitian ini mendukung teori stewardship yang menyatakan bahwa steward (pemerintah desa) akan memaksimalkan dan meluruskan tujuan organisasi selaras dengan tujuan prinsipal (masyarakat sebagai pemilik dana). Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat di Desa Pronojiwo terhadap akuntabilitas dana desa sudah diterapkan dengan baik. Namun adanya arah negatif pada variabel pemanfaatan teknologi informasi disebabkan fenomena yang terjadi di Desa Pronojiwo yaitu erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan kurang maksimalnya indikator jaringan internet. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rendahnya nilai kuesioner variabel pemanfaatan teknologi informasi pada indikator jaringan internet.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dana Desa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of human resource competence, the use of information technology, the government's internal control system and community participation on village fund accountability. This study used a sample of 70, which was obtained through the saturation sampling method or saturated samples for all village officials and heads of RT and RW heads as part of the Village Community Institutions. This study uses multiple linear regression in SPSS 29 software.

The results of this study indicate that human resource competence, the government's internal control system and community participation have a significant positive effect on village fund accountability. Meanwhile, the use of information technology has a significant negative effect. The results of this study support the stewardship theory which states that the steward (village government) will maximize and align organizational goals in harmony with the principal's goals (the community as the owner of the funds). These results indicate that the competence of human resources, the use of information technology, the government's internal control system and community participation in Pronojiwo Village for village fund accountability have been well implemented. However, there is a negative direction in the use of variable information technology due to the phenomenon that occurred in Pronojiwo Village, namely the eruption of Mount Semeru which caused the internet network indicator to be less than optimal. This can be proven by the low value of the variable questionnaire on the use of information technology on the internet network indicator.

Keywords : Human Resource Competency, Utilization of Information Technology, Government Internal Control System, Society Participation, Village Fund Accountability

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
DECLARATION	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	19

2.2.1 Akuntansi Manajerial.....	19
2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	22
2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	25
2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	28
2.2.5 Partisipasi Masyarakat	33
2.2.6 Akuntabilitas Dana Desa.....	36
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	37
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.....	38
2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.....	39
2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Dana Desa	40
2.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa .	41
2.4 Kerangka Konseptual.....	42
BAB 3 METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Definisi Operasional.....	45
3.4 Populasi dan Sampel	46
3.4.1 Populasi.....	46
3.4.2 Sampel	47
3.5 Jenis dan Sumber Data	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis	49
3.8 Pengujian Hipotesis.....	52

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....55

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian55

DAFTAR ISI

4.1.1 Lokasi Penelitian 55

4.1.2 Karakteristik Responden..... 55

4.2 Analisis Data.....57

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 57

4.2.2 Uji Kualitas Data 59

4.2.2.1 Uji Validitas..... 59

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 61

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 62

4.2.3.1 Uji Normalitas 62

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 63

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 64

4.2.4 Pengujian Hipotesis 66

4.2.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 66

4.2.4.2 Uji Parsial(Uji T) 68

4.2.4.3 Uji Simultan (Uji F) 70

4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 71

4.3 Pembahasan72

4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas
Dana Desa..... 72

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Dana Desa..... 75

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap
Akuntabilitas Dana Desa 78

4.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa... 82

BAB 5 PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	45
Tabel 3.2 Skala Likert.....	49
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	65
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	66
Tabel 4.8 Hasil Uji T	69
Tabel 4.9 Hasil Uji F	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	95
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data.....	107
Lampiran 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	116
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	116
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas.....	123
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas	124
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	124
Lampiran 8 Hasil Uji Heterokedastisitas	125
Lampiran 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	125
Lampiran 10 Hasil Uji T.....	125
Lampiran 11 Hasil Uji F.....	126
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	126
Lampiran 13 Dokumentasi Pengambilan Data.....	127

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Otonomi desa yaitu otonomi yang bukan merupakan pemberian dari pemerintah dan murni dimiliki oleh desa (Widjaja, 2008). Pemerintah memiliki kewajiban menghormati otonomi murni yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi Desa diartikan sebagai adanya kesanggupan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya berdasarkan pada kemampuannya sendiri dengan semaksimal mungkin mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Otonomi Desa merupakan bukti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi ini adalah bentuk dari restrukturisasi wewenang dari yang awalnya semua tanggung jawab keputusan hanya berada di pemerintah pusat lalu berganti tanggung jawab tersebut ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah (Noor, 2012).

Persoalan tentang desa terutama dalam aspek kebijakan desentralisasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sepanjang perkembangan dan perubahan peraturan tersebut, substansi mengenai batasan wilayah, struktur pemerintahan desa dan fungsi serta kewenangan pemerintahan desa turut mengalami perkembangan dan perubahan. Maka lahirlah Undang – Undang yang

membahas tentang desa pertama kali setelah kemerdekaan yaitu UU Nomor 19 Tahun 1965.

Keberadaan UU No. 19 Tahun 1965 digantikan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 1979 yang juga khusus membahas mengenai desa. Hadirnya UU tersebut bertujuan untuk menggantikan UU sebelumnya yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti.

UU No. 5 Tahun 1979 pada akhirnya digantikan dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 seiring dengan runtuhnya rezim orde baru. Orde reformasi ditandai dengan munculnya semangat untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih demokratis. Tak lama setelah itu UU No 22 Tahun 1999 kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004. Dalam UU ini pada dasarnya memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk terlibat lebih banyak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (Aritonang, 2015).

Seiring perkembangannya, regulasi khusus yang mengatur tentang desa akhirnya diterbitkan oleh pemerintah dan DPR yaitu Undang – Undang No 6 Tahun 2014. Undang – Undang ini berisi tentang sekumpulan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan menimbang bahwa desa telah mengalami perkembangan sehingga penting diberi perlindungan supaya tangguh, maju, independen, dan demokratis. Dengan adanya UU Tentang Desa ini memberikan landasan yang kokoh untuk desa ketika mewujudkan masyarakatnya yang mandiri, dimana desa bukan hanya sebagai antek daerah saja tetapi sebaliknya desa dan

masyarakatnya memiliki hak untuk berbicara atas keperluan masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini desa memiliki kekuasaan dalam mengurus desanya secara bebas termasuk bidang sosial, politik, ekonomi, dan dapat melakukan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, ada wacana perlunya revisi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada tahun 2023 ini sudah berusia sembilan tahun oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menurut hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa saat ini.

Belum lama ini diterbitkan peraturan tentang desa yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Keutamaan Pemakaian Dana Desa Tahun 2023. Keutamaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Dimana Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Covid – 19.

Dengan adanya Undang - Undang Desa ini isi kebijakannya yaitu tiap desa akan memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih 1 Milyar per tahun. Kucuran dana tersebut biasa disebut dana desa. Dana desa adalah keuangan yang berasal dari APBN yang diperuntukan untuk desa (BKT,

2020). Setiap tahun, pemerintah memberikan kontribusi dana desa dalam jumlah tertentu untuk mendukung berbagai inisiatif pengembangan masyarakat. Besaran dana desa telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 342 triliun dari 2018 sampai dengan 2022. Anggaran dana desa yang dianggarkan setiap tahun dirinci sebagai berikut.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa

NO	TAHUN	ANGGARAN PUSAT	ANGGARAN PER DESA
1.	2018	Rp60 Triliun	Rp800, 4 Juta
2.	2019	Rp70 Triliun	Rp933,9 Juta
3.	2020	Rp72 Triliun	Rp960, 6 Juta
4.	2021	Rp72 Triliun	Rp960,6 Juta
5.	2022	Rp68 Triliun	Rp907, 2 Juta

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) menerangkan bahwa “Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Disebutkan juga pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah Desa dibagikan peluang dalam menangani kegiatan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu diperlukan pemerintahdesa yang independent dalam mengolah pemerintahannya dan seluruh SDM yang dimiliki, tercantum dalam pengurusan keuangan dan harta benda milik desa. Karena sangat besar tugas yang didapat pemerintah desa, maka tanggungjawabnya juga harus besar. Oleh sebab itu pemerintah desa wajib dapat merealisasikan

komitmen akuntabilitas di dalam lingkup pemerintahannya, di mana penghujung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Untuk dapat menolong tugas pemerintah desa ketika menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penggunaan aplikasi ini dapat membantu aparatur dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan tentu saja sesuai dengan peraturan undang-undang (Nuswantoro, 2023).

Di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang sudah menerapkan penggunaan Siskeudes untuk dapat membantu meningkatkan pengelolaan keuangan desanya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Pronojiwo sudah baik. Namun, di tahun 2020 kemarin terjadinya pergantian aparatur desa di Desa Pronojiwo. Sehingga dengan adanya pergantian aparatur desa tersebut, akuntabilitas keuangan desa tersebut apakah masih tetap sama seperti sebelumnya atau mengalami perubahan. Mengingat aparatur desa sebagai pihak pengelolanya mengalami perubahan.

Selain itu mengingat fakta di lapangan saat ini masih banyaknya kepala desa yang merugikan negara dengan melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Dimana dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, namun

malah diselewengkan untuk kebutuhan pribadi. Seperti kasus yang baru – baru ini terjadi di penghujung tahun 2022 yaitu Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang yaitu AHJK melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020 hingga 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 535 Juta. Hal tersebut teridentifikasi ketika adanya pemeriksaan dan penyidikan keuangan akibat pembangunan di Desa Sumber Anyar tidak bisa tepat waktu (Sasongko, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan akuntabilitas ketika mengelola dana desa dapat meningkat, apa saja yang melatarbelakangi. Kualitas sumber daya terutama sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa dapat berjalan dengan lancar. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah para aparatur desa yang bertugas untuk mengurus dana desa. Kemampuan aparatur desa dalam mengurus dana desa juga menjadi salah satu kriteria penyelenggaraan dana desa yang bagus dan dapat dipertanggungjawabkan karena aparatur desa yang kompeten dan cakap akan efisien dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021) dan Siti Umaira dan Adnan (2019) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh akan akuntabilitas dana desa.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas organisasi memiliki peran yang sangat penting dan juga sangat bermanfaat. Bentuk

pemanfaatan teknologi informasi dapat berupa pengaplikasian teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia dengan baik. Dibuktikan dengan ketersediaan komputer yang memadai, adanya jaringan internet serta penerapan sistem yang membantu pengelolaan keuangan desa seperti Sisikeudes. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019), Evi Marlina, Sri Rahmayanti dan Ameilia Dwi Rur Afdilah Futri (2021) yang menyatakan jika teknologi informasi membuat pelaporan keuangan lebih cepat dan lebih mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan tingkat tanggung jawab atas pengelolaan dana desa.

Berikutnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas dana desa yang lancar. Mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan, maka pemerintah perlu menerapkan sebuah sistem untuk pengendalian dari aktivitas tersebut yang berupa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi fraud. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019) dan Mufti Arief Arfiansyah (2020) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Terakhir, karena banyaknya program kerja desa, perangkat desa kini bergantung pada dukungan masyarakat untuk membantu mengelola dana desa

secara efektif. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, pemantauan, dan perlindungan lingkungan. Aparatur desa idealnya diminta untuk membuka informasi tentang bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa, dan masyarakat perlu berpartisipasi dengan menawarkan ide dan saran bagaimana menggunakan dana tersebut. Risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat dikurangi dengan adanya keterlibatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019), I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019), Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021) dan Siti Umaira dan Adnan (2019) yang menyatakan jika akuntabilitas dana desa dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Namun berbeda dengan temuan Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliasuti Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian yang telah dijabarkan diatas mendorong peneliti dalam melakukan penelitian ulang dengan topik yang sama yaitu mengenai akuntabilitas dana desa. Penelitian ini adalah peningkatan dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini menambahkan variabel yang masih sedikit yang meneliti yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Lumajang”. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas mereka dalam pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berdasar pada rumusan masalah pada penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
3. Untuk menguji apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
4. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan serta pengetahuan tentang dampak kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal

pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Serta didambakanbisa untuk bahan acuan penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan temuan dari penyusunan penelitian ini mampu menyajikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pertimbangan pemerintahan Desa Pronojiwo yang telah menjadi objek penelitian dalam hal mengetahui aspek – aspek yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

2. Bagi Peneliti

Dari adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kepada peneliti yang berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari tingkat kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP sekaligus peran masyarakat dalam berpartisipasi, terhadap akuntabilitas dana desa.

3. Bagi Pengguna

Temuan dari penyusunan penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan bagi seluruh pihak khususnya BPD dan masyarakat mengenai akuntabilitas dari dana desa.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam pembuatan proposal ini adalah seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	VARIABEL PENELITIAN	SAMPEL DAN METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN	RESEARCH GAP
1.	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti dan Dania Puspitasari (2018)	<u>Variabel X :</u> Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal. <u>Variabel Y :</u> Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<u>Sampel :</u> Perangkat desa di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang sebanyak 42 orang. <u>Metode Analisis :</u> Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.	<u>Perbedaan :</u> Penelitian terdahulu memakai variabel X peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X sistem pengendalian internal dan variabel Y akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	I Putu Julianto dan	<u>Variabel X :</u>	<u>Sampel :</u>	Hasil penelitian menunjukkan	<u>Perbedaan :</u>

	Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019)	Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa dan Komitmen Pemerintah Daerah. <u>Variabel Y :</u> Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	56 desa dengan jumlah responden 224 <u>Metode Analisis :</u> Analisis Regresi Linier Berganda	bahwa partisipasi masyarakat, penggunaan sitem keuangan desa, kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.	Penelitian terdahulu memakai variabel X (partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah daerah) sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. Penelitian terdahulu memakai variabel Y keberhasilan pengelolaan dana desa sedangkan penelitian terbaru memakai akuntabilitas dana desa. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X partisipasi masyarakat.
3.	Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019)	<u>Variabel X :</u> Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) <u>Variabel Y :</u>	<u>Sampel :</u> Aparatur desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebanyak 8 dari 27 desa penerima dana desa terbesar sebanyak 56 aparat. <u>Metode Analisis :</u>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi	<u>Perbedaan :</u> Penelitian terdahulu memakai variabel X (kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan sistem pengendalian internal pemerintah) sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

		Akuntabilitas Dana Desa	Analisis Regresi Linier Berganda	akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.	pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah. Selanjutnya variabel Y memakai akuntabilitas dana desa.
4.	I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019)	<u>Variabel X :</u> Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. <u>Variabel Y :</u> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	<u>Sampel :</u> Perangkat desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sebanyak 72 orang. <u>Metode Analisis:</u> Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.	<u>Perbedaan :</u> Penelitian terdahulu memakai variabel X akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. Penelitian terdahulu memakai variabel Y efektivitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian terbaru memakai akuntabilitas dana desa. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X partisipasi masyarakat.
5.	Evi Marlina, Sri	<u>Variabel X :</u>	<u>Sampel :</u>	Hasil penelitian menunjukkan	<u>Perbedaan :</u>

	Rahmayanti dan Ameilia Dwi Rur Afdilah Putri (2021)	Kepemimpinan, Kompetensi dan Teknologi Informasi <u>Variabel Y :</u> Akuntabilitas Pengelola Dana Desa	76 perangkat desa di Kecamatan Rakit Kulim yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan operator desa. <u>Metode Analisis:</u> Analisis Regresi Linier Berganda	bahwa kepemimpinan, kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.	Penelitian terdahulu memakai variabel X kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X kompetensi dan teknologi informasi.
6.	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	<u>Variabel X :</u> Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <u>Variabel Y :</u> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<u>Sampel :</u> Pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 150 desa. <u>Metode Analisis :</u> Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	<u>Perbedaan :</u> Penelitian terdahulu memakai variabel X sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u> Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menggunakan variabel X sistem pengendalian internal.
7.	Lukman Hakim,	<u>Variabel X :</u>	<u>Sampel:</u>	Hasil penelitian menunjukkan	<u>Perbedaan :</u>

	Tengku Juhri Agustan dan Sahnani Ranguti (2022)	Penerapan Tata Kelola yang Baik, Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Partisipasi Masyarakat. <u>Variabel Y :</u> Akuntabilitas Keuangan Desa	Terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis yang berjumlah 100 responden. <u>Metode Analisis :</u> Analisis Regresi Linier Berganda	bahwa penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.	Pada penelitian terdahulu memakai variabel X (penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat) sedangkan pada penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u> Pada penelitian ini sama - sama menggunakan variabel X partisipasi masyarakat.
8.	Icuk Ranga Bawono, Anasti Dwi Martanty Kinasih dan Apriani Kartika Rahayu (2020)	<u>Variabel X :</u> Peran Perangkat Desa, Kompetensi Pemerintah Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) <u>Variabel Y :</u> Akuntabilitas Pengelola Dana Desa <u>Variabel Z :</u> Implementasi Sistem Keuangan Desa	<u>Sampel :</u> Sampelnya yaitu 56 desa di Kabupaten Banyumas ada 182 responden. <u>Metode Analisis :</u> Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa dan implementasi SISKEUDES positif signifikan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana yang diberikan pada desa. Lalu peran perangkat	<u>Perbedaan :</u> Pada penelitian terdahulu memakai variabel X (peran perangkat desa, kompetensi pemerintah desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)) sedangkan penelitian terbaru memakai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat. <u>Persamaan :</u>

				<p>desa dan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa adalah positif signifikan berpengaruh terhadap implementasi aplikasi SISKEUDES di pemerintah desa. Selanjutnya SISKEUDES mampu memediasi hubungan antara peran perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini membuktikan bahwa implementasi SISKEUDES memediasi hubungan antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas desa pengelolaan dana.</p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel Y akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
9.	Ridha Fajri, Restu Agusti dan	Variabel X : Transparansi, Partisipasi	Sampel : Pemerintah desa di 17 desa,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Perbedaan : Pada penelitian terdahulu memakai

	Julita (2021)	Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pemahaman Regulasi Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	dimana setiap desa diambil 6 responden yang memenuhi kriteria. Metode Analisis : Analisis regresi linear berganda dan Moderate Regression Analysis (MRA)	transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan pemahaman regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	variabel X (transparansi, dan Pemahaman Regulasi) sedangkan penelitian terbaru memakai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel X (partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa) dan variabel Y akuntabilitas pengelolaan dana desa.
10.	Siti Umaira dan Adnan (2019)	Variabel X : Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sampel : Pemerintah desa di 60 desa, dimana setiap desa diambil 2 responden yang memenuhi kriteria. Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Perbedaan : Pada penelitian terdahulu memakai variabel X pengawasan sedangkan penelitian terbaru memakai pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP. Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel X (partisipasi masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia) dan variabel Y akuntabilitas pengelolaan dana desa.
11	Nafadhila Eka Indraswari (2021)	Variabel X : Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan	Sampel : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan	Perbedaan : Pada penelitian terdahulu memakai variabel X (kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

		Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda	partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	informasi dan partisipasi masyarakat) sedangkan penelitian terbaru menambahkan variabel SPIP Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel X (kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat).
--	--	---	--	--	---

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Manajerial

Teori besar dalam penelitian ini yaitu akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat dianggap sebagai suatu sistem informasi yang menggunakan masukan (input) agar menghasilkan keluaran (output) dan diproses untuk dapat mencapai tujuan manajemen (Krismanji & Aryani, 2014). Masukan (input) yang dimaksud adalah mulai dari pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan dan pengelolaan semua aktivitas suatu manajemen. Dimana hasil akhirnya nanti (output) adalah sebuah laporan keuangan. Fokus dari akuntansi manajerial adalah memberikan informasi keuangan agar dapat memberikan manfaat bagi

pihak – pihak pemakai laporan khususnya bagi pihak internal organisasi yang bisa dipakai sebagai aturan dalam pengambilan keputusan.

Turunan dari akuntansi manajemen yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Pada dasarnya akuntansi manajemen sektor publik memiliki beberapa kemiripan dengan sektor swasta. Perbedaan hanya berupa tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban dan karakteristik anggaran. Data akuntansi disediakan oleh manajemen sektor publik, yang dapat dimanfaatkan oleh manajer sektor publik untuk melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian untuk organisasi, institusi, atau entitas.

Pada organisasi sektor publik, tugas utama akuntansi manajemen adalah memberi manajer informasi akuntansi yang akurat dan terkini sehingga mereka dapat melakukan tugas perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi di sektor publik, perencanaan dimulai dengan perencanaan strategis, dan pengendalian dilakukan pada pengendalian tugas (Mardiasmo, 2002). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut akuntansi manajemen memiliki peranan yang penting.

Jika menyangkut tentang organisasi sektor publik teori yang relevan yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* berkembang pada saat awal masa perkembangan akuntansi pada tahun 1957. Teori *stewardship* merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan focus utama yang terpenting dari suatu laporan keuangan (Oktavianus Pasaloran, 2001). Hal tersebut didasarkan pada adanya gagasan pihak manajemen pada sebuah entitas

memiliki tanggung jawab pada pemilik dalam melindungi aset yang di amanahkan kepada dirinya. Pemilik berperan menjadi principal sedangkan manajemen adalah steward (Arfiansyah, 2020).

Teori *stewardship* memiliki akar psikologi dan sosiologi yang ditata untuk menjabarkan keadaan dimana manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Raharjo, 2007). Pada teori ini manajemen akan bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Jadi saat kepentingan manajemen dan pemilik berbeda, manajemen akan berupaya bekerja sama daripada mendebatnya. Karena manajemen berpendapat melaksanakan kepentingan bersama dan bertindak sesuai instruksi pemilik adalah hal yang rasional untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku dari manajemen adalah bersama – sama sesuai didasarkan pada tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Ilmuan teori *stewardship* berpendapat jika kesuksesan organisasi erat kaitannya dengan kepuasan pemilik. Oleh karena itu manajemen akan menjaga dan memaksimalkan kesejahteraan prinsipal melalui kinerja organisasi. Dengan demikian hasil yang ingin dicapai akan dapat maksimal. Dapat disimpulkan bahwa teori *stewardship* memiliki anggapan bahwa manajemen meluruskan tujuannya selaras dengan tujuan pemilik.

Dalam pemerintahan desa aparatur desa berperan sebagai *steward* serta mewakili pemerintah desa, dan masyarakat memiliki peran sebagai penyedia dana (*principal*). Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara keduanya, karena

pemerintah desa dituntut untuk menyediakan dan mengutarakan semua informasi yang diperlukan oleh pemilik sebagai pemakai informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga tujuan yang ingin di capai oleh pemerinta desa harus sejalan dengan tujuan pemilik (masyarakat desa) (Arfiansyah, 2020).

2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Boyatzis (1982) berpendapat bahwa kompetensi dianggap sebagai karakteristik yang menjadi dasar seorang individu melakukan perubahan terkait dengan kinerja kerja yang efektif. Sedangkan menurut pendapat LeBoterf (1998), kompetensi memiliki arti bahwa sumber daya tersebut mengetahui bagaimana bertindak, melakukan, bersikap dan mengatur sumber daya tersebut yaitu dirinya sendiri. Kemudian Jackson dan Schuler (2003) berpendapat bahwa kompetensi memiliki definisi yaitu keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan karakteristik yang diperlukan untuk dapat mengerjakan pekerjaan nya dengan baik (Geffenberger, 1967).

Dari rangkuman pandangan para ahli di atas dapat diambil ketentuan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah potensi seorang individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Untuk menyelesaikan tugas dan melaksanakan kegiatan organisasi, sumber daya manusia memiliki tugas yang sangat penting. Menurut Mathis (2002), poin sumber daya manusia dipengaruhi oleh pemanfaatan kemampuan atau

keterampilan (kompetensi) yang dimiliki manusia pada saat melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal berkemungkinan tidak memandang latar belakang, dan hanya berfokus untuk mengembangkan kompetensinya.

Dalam pemerintah desa sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa sebagai pihak yang mengelola urusan di desa. Desa dibentuk sebagai entitas pemerintah dengan tujuan melayani masyarakat. Organisasi pemerintahan harus dikelola dan ditugaskan kepada sumber daya manusia yang dipilih dengan cermat yang memiliki semangat tinggi, dedikasi total, dan kompetensi yang baik untuk melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan karena memiliki tugas yang sulit.

Pembinaan aparatur desa merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk mengimbangi kemajuan masyarakat, inovasi teknis, serta tanggung jawab dan wewenang yang semakin luas yang harus diemban. Ada beberapa pendekatan untuk membangun perangkat desa berdasarkan kekurangan dan tuntutan, antara lain:

1. Meningkatkan Tingkat Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan berlaku untuk aparatur desa yang tingkat pendidikannya adalah tamatan SD dan SMP. Aparat desa yang belum tamat SMA wajib mengikuti ujian Paket B dan Paket C sebagai bentuk peningkatan pendidikan.

2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Diklat yaitu sebuah program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi seseorang. Dalam hal ini, diklat untuk perangkat desa dapat berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa.

3. Kursus atau *In House Training*

Kursus atau In-House Training adalah program pelatihan yang ditujukan untuk perangkat desa. Tujuannya adalah untuk membantu perangkat desa memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dan pengelola desa, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam hal terkait pemerintahan desa.

4. Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa

Pengembangan sistem seleksi perangkat desa adalah proses untuk memperbaiki dan meningkatkan cara bagaimana perangkat desa dipilih dan ditunjuk untuk melayani masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tepat yang dapat menjabat sebagai perangkat desa. Sistem seleksi yang baik dan transparan akan memastikan bahwa hanya individu yang berkualitas dan layak yang dapat menjabat sebagai perangkat desa, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Haag dan Keen (1996) mengetakan bahwa “Teknologi informasi adalah gabungan alat yang bermanfaat untuk menolong manusia dalam mengerjakan pekerjaannya yang berkaitan dengan informasi dan melakukan berbagai macam pekerjaan yang berangkaian dengan pemrosesan informasi.” Sedangkan Lucas (2000) berpendapat bahwa “Teknologi informasi adalah segala hasil yang diperoleh dari implementasi teknologi untuk dapat melakukan proses dan pengiriman informasi baik dalam bentuk komputer mikro, peranti lunak untuk lembar kerja, peranti lunak dalam pemrosesan suatu transaksi maupun peralatan jaringan dan komunikasi.” Kemudian ada pendapat terbaru dari Sutabri (2014) menyatakan jika “Teknologi informasi adalah teknologi yang bermanfaat mengolah data, baik memanipulasi, menyimpan, menyusun, mendapatkan, maupun memproses data menggunakan macam metode untuk mewujudkan informasi yang berkualitas, adalah informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu yang mana dapat berguna baik untuk keperluan bisnis, pribadi, maupun pemerintahan” (Vincek et al., 1981).

Dari uraian pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah sekumpulan alat yang diperoleh dari implementasi teknologi yang bermanfaat dalam pengembangan dan manajemen data informasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan disimpan

dapat diakses dan digunakan dengan mudah dengan analisis dan interpretasi data untuk membuat keputusan yang informatif dan berguna bagi.

Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2005 memaparkan sesungguhnya untuk meningkatkan terealisasinya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat atau daerah memiliki kewajiban untuk memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan memberi kemudahan tersampainya informasi keuangan ke publik.

Di pemerintahan desa sendiri ada beberapa bentuk teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu aparatur desa dalam menjalankan tugas – tugas organisasi yang pertama yaitu penggunaan komputer. Perangkat desa dapat memanfaatkan komputer sebagai alat kerja untuk memasukkan data lebih cepat daripada secara manual saat membuat laporan keuangan pemerintah desa. Penggunaan komputer ini memiliki kelebihan dengan keadaan akurasi dan hasil olah data, sehingga akan menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan keuangan masyarakat (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Lalu pemanfaatan teknologi informasi yang kedua yaitu jaringan internet. Di zaman modern dan canggih seperti saat ini, koordinasi antara atasan dan bawahan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah melalui

internet. Selain itu, bagi bawahannya mereka bisa mengirim tugas-tugas berupa laporan kegiatan yang telah dibuat melalui sebuah sistem administrasi tersebut tanpa perlu langsung melaporkan secara tatap muka. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat koordinasi kegiatan di bidang pemerintahan. Selain itu dapat mempermudah dan menyeragamkan sistem administrasi antar instansi pemerintah, pusat ke daerah ataupun sebaliknya.

Dan yang terakhir ada penerapan sistem atau aplikasi yang dapat menunjang seperti word dan excel serta aplikasi yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Siskeudes. Untuk penggunaan aplikasi word atau excel dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyusunan laporan. Selain itu ada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berfungsi untuk meningkatkan mutu tata kelola keuangan desa. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilakukan dengan tujuan dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini mampu mendukung Pemerintah Desa mengurus dana desa yang berawal dari pembuatan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan sampai pertanggungjawaban melalui sistem komputer untuk menciptakan mutu penyelenggaraan keuangan desa yang berkualitas.. Dimana dalam peluncuran aplikasi ini sudah disesuaikan dengan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa yang terbaru yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (T.M et al., 2021).

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam perundang – undangan di Indonesia segala hal yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) tercantum di PP Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, “SPIP adalah proses yang menyeluruh dalam perbuatan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikeyakinan yang layak atas tercapainya tujuan organisasi melewati kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, mekanisme kontrol ini dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai tingkatan. Misi utama SPIP adalah menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keterpercayaan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan pada undang-undang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ada lima unsur diantaranya :

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap pemimpin organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan lingkungan pengendalian yang mengarah pada perilaku yang konstruktif dan ideal untuk implementasi sistem. Kegiatan untuk pengendalian internal yang dilakukan dalam dunia kerja meliputi:

- a. Penguatan integritas dan nilai adab
 - b. Tanggung jawab pada kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang sehat
 - d. Pembuatan susunan organisasi berdasarkan yang dibutuhkan
 - e. Pelimpahan tugas dan pertanggungjawaban yang sesuai
 - f. Menyusun dan menerapkan strategi yang mumpuni dalam membina SDM
 - g. Bentuk kedudukan aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
 - h. Kaitan kinerja yang baik dengan instansi terkait
2. Penilaian Resiko

Setiap pemimpin di pemerintahan wajib untuk melaksanakan penilaian resiko. Dalam penilaian resiko ini dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Identifikasi Resiko

Dalam proses identifikasi resiko harus melakukan hal – hal yang telah ditentukan diantaranya :

- Menggunakan pendekatan yang secara komprehensif sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan di tingkat kegiatan.
- Menggunakan langkah-langkah yang cukup untuk mengenali bahaya dari pengaruh internal dan eksternal.
- Menentukan faktor risiko tambahan yang mungkin ada.

b. Analisis Resiko

Analisis Risiko dalam instansi pemerintah adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengukuran potensi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan dan operasi dari suatu instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instansi tersebut memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko yang mungkin muncul dan meminimalkan dampak dari risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian di instansi pemerintah yaitu serangkaian perilaku yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dan operasi instansi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditentukan. Kegiatan pengendalian membantu instansi pemerintah untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efisien dan efektif. Beberapa karakteristik pengendalian yang harus dimiliki diantaranya :

- a. Aktivitas pengendalian harus berfokus pada aktivitas utama dari instansi pemerintah tersebut.
- b. Aktivitas pengendalian wajib untuk dihubungkan pada aktivitas penilaian risiko.
- c. Aktivitas pengendalian harus menyesuaikan pada sifat tertentu yang ada pada instansi;
- d. Otoritas serta tata cara perlu di tuliskan

- e. Pelaksanaan prosedur dalam sebuah instansi harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tertulis
- f. Aktivitas pengendalian harus melalui evaluasi secara berkala sebagai alat ukur bahwa pengendalian yang dilakukan adalah benar.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah harus mengenali, menangkap, dan menyebarkan informasi berisi format yang sesuai pada waktu yang tepat. Penyebaran informasi harus dilakukan secara efisien. Para pelaksana instansi pemerintah harus mempraktekkan beberapa hal agar dapat berkomunikasi secara efektif, antara lain:

- a. Melakukan pengadaan dan pemanfaatan beragam bentuk prasarana komunikasi.
- b. Melakukan pengelolaan, pengembangan, serta pembaruan sistem informasi secara berkala

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern harus diawasi oleh pimpinan instansi pemerintah. Beberapa tindakan yang diambil untuk memantau sistem pengendalian internal, antara lain:

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah proses sistematis dan terus-menerus untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu program, proyek, atau

aktivitas untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditentukan.

b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi Terpisah adalah proses evaluasi independen yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu program, proyek, atau aktivitas. Evaluasi terpisah dilakukan oleh tim evaluasi independen yang tidak terkait dengan program, proyek, atau aktivitas yang akan dievaluasi. Evaluasi terpisah membantu untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi suatu program, proyek, atau aktivitas terhadap tujuan yang ditentukan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Review Lainnya

Kelanjutan saran hasil audit dan review lainnya adalah proses mempraktekkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor atau tim review untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu program, proyek, atau aktivitas.

Dalam pemerintahan desa keberadaan lembaga Badan Permusyawarata Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas BPD diantaranya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa (Sunarti, 2014).

BPD menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa dimana BPD tersebut adalah sebagai perwakilan rakyat. Adapun kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sekaligus mengawasi roda pemerintahan desa. Salah satu tugas lain BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan segala kebijakan pemerintahan desa. Selain mengawasi, BPD juga sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan yang berkaitan dengan pembangunan di desa, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD.

2.2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bentuk dari keterlibatan individu atau perkelompok individu baik secara fisik maupun mental dan perasaan yang mendorongnya untuk dapat berkontribusi berupa sumbangan baik materil maupun non materil dengan upaya usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap terhadap kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut (Syamsyudin, 2008). Jika di dalam area pemerintahan pihak yang berpartisipasi adalah masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah proses dimana individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, proyek, atau aktivitas yang

mempengaruhi hidup mereka. Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada tingkat lokal, nasional, atau internasional dan melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Dalam penyusunan APBD masyarakat diharapkan terlibat dan ikut juga mengontrol semua kebijakan yang dibuat pemerintah di lapangan (Putra & Rasmini, 2019).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program – program yang dirancang oleh aparat pemerintahan baik pembangunan ataupun pemberdayaan penduduk. Partisipasi masyarakat disini tidak sekedar memberikan usulan dan masukan, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa aktivitas program dan proyek dapat dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Semakin banyak orang yang berpartisipasi, semakin banyak pula orang yang ikut melibatkan diri pada pemungutan ketetapan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin besar keterlibatan orang-orang tersebut, semakin besar pula rasa kewajiban mereka untuk melakukan ketetapan yang dibuat, dan pengembangan masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat ini memiliki berbagai macam keuntungan diantaranya :

1. Partisipasi meningkatkan representasi dan basis pengetahuan.
2. Partisipasi mampu mempererat hubungan kekuasaan antar pemangku kepentingan dan transparansi komunikasi.
3. Partisipasi dapat meningkatkan proses iteratif dan sirkular dan memberikan jaminan jika solusi didasarkan pada pemahaman dan keahlian regional. Akibatnya, inisiatif yang diambil akan lebih berhasil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, dari banyaknya keuntungan yang ada bentuk partisipasi masyarakat juga menimbulkan kerugian yaitu :

1. Partisipasi masyarakat dapat disalahgunakan untuk melakukan manipulasi pada mereka. Masyarakat yang berpartisipasi akan tidak sadar bisa juga sadar telah dirugikan apabila:
 - a. Perangkat yang memiliki keahlian dalam prosedur tersebut melakukan manipulasi terhadap partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi.
 - b. Partisipasi dapat meningkatkan biaya dan durasi proyek jika tidak direncanakan dengan baik, tanpa jaminan bahwa hal itu akan memberikan hasil yang nyata.
2. Konflik dapat muncul ketika orang berpartisipasi. Metode partisipasi dapat menimbulkan konflik yang dapat membahayakan keberhasilan proyek dengan menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan sosial politik yang sudah ada.

2.2.6 Akuntabilitas Dana Desa

Menurut (Sujarweni, 2015), “Akuntabilitas atau biasa disebut dengan pertanggung jawaban adalah bentuk kewajiban pihak - pihak agar semua tugas yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.” Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pengelola untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang diterima dan digunakan, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Hasil akhir pengelolaan dana desa berbentuk akuntabilitas yang merupakan kewajiban pihak pengelola (pemerintah desa) sebagai pelaksanaan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Pahlawan et al., 2020). Pemerintah desa diharapkan dapat menumbuhkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang merupakan amanat rakyat. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah dengan melakukan perbaikan dalam hal penyampaian laporan keuangan, yaitu pemerintah harus sanggup mempersiapkan informasi keuangan yang sesuai dengan jujur dan transparan secara umum (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa mengacu pada kecakapan pemerintah desa untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas tindakanyang diambil sehubungan dengan kemajuan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011). Jika kondisi dalam operasi organisasi terpenuhi memilih tujuan yang tepat, mampu menciptakan standar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai

tujuan, mendorong penggunaan penerapan standar secara efektif, dan menciptakan standar dan operasi organisasi, maka dapat dikatakan bahwa manajemen itu akuntabel (Husna & Abdullah, 2016).

Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak sesuai aturan serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini aparat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya. Akuntabilitas kepada publik merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjalankan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa kepada organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya melalui laporan pertanggungjawaban.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015), “Hipotesis adalah jawaban sementara yang belum valid terhadap masalah yang diteliti dan sifatnya masih praduga karena masih harus diuji kebenarannya.” Hal itu dikarenakan jawaban sementara yang belum valid itu didasarkan hanya pada teori dan belum menggunakan fakta – fakta empiris atau di lapangan.

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah satu dari sekian banyak aspek penting yang harus di eksplorasi, karena sumber daya manusia inilah yang akan mengelola dana desa tersebut.

Dalam teori *stewardship* ada dua pihak yang berperan. Pada kasus ini pihak yang berperan sebagai pemilik (*principal*) adalah masyarakat sedangkan pihak yang berperan sebagai manajemen (*steward*) adalah aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Teori ini menitikberatkan garis besar bahwa manajemen (*steward*) akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*) melalui kinerja organisasi. Untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik dana hal yang pertama harus diperhatikan adalah mengukur kompetensi sumber daya manusia yaitu para aparatur desa.

Ketika kompetensi pemerintah desa yang rendah atau masih minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa maka perbuatan seperti korupsi bisa saja terjadi. Namun, ketika kompetensi aparatur desa yang memadai dapat mendorongnya untuk dapat memahami cara pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada. Sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan penelitian Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021),

Siti Umaira dan Adnan (2019) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi juga tambah berkembang pesat. Teknologi informasi yang berkembang ini dapat mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi sudah digunakan pada semua sektor karena sangat membantu dalam hal melaksanakan kegiatan organisasi.

Dalam teori *stewardship* menitikberatkan garis besar bahwa manajemen (*steward*) akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*) melalui kinerja organisasi. Untuk dapat membantu memaksimalkan kinerja organisasi adalah dengan menggunakan berbagai aspek yang dapat membantu untuk mencapainya yaitu salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam hal untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat mendukung. Bentuk laporan yang andal membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Hal itu sesuai dengan penelitian Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019), Evi

Marlina, Sri Rahmayanti dan Ameilia Dwi Rur Afdilah Futri (2021) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Sehingga ketika pemanfaatan teknologi informasi meningkat juga akan menaikkan akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H_2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk setiap tindakan yang dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak organisasi yaitu petinggi dan karyawan, untuk memberi jaminan yang cukup bagi tercapainya tujuan organisasi yang akan dicapai dalam tindakan-tindakan yang efisien dan laporan keuangan berkualitas tinggi (Aswir & Misbah, 2018). Hal itu selaras dengan teori *stewardship* yang menitikberatkan garis besar bahwa manajemen (*steward*) akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*) melalui kinerja organisasi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan faktor penting dalam implikasi akuntabilitas dana desa. Karena dalam pemerintahan dengan adanya sistem pengendalian ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan internal pemerintahan. Selain itu dapat menyerahkan kepercayaan

seutuhnya pada prosedur terselenggaranya pemerintah desa ketika pengelolaan dana desa berdasarkan aturan yang berlaku.

Ketika penyelenggaran SPIP di instansi pemerintah itu meningkat, maka juga akan meningkatkan akuntabilitas dana desa. Hal itu sesuai dengan penelitian Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019) dan Mufti Arief Arfiansyah (2020) yang membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Partisipasi masyarakat adalah proses dimana individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan dan berhak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, proyek, atau aktivitas yang mempengaruhi hidup mereka. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat membantu memaksimalkan akuntabilitas dana desa. Ketika tingginya tingkat keikutsertaan individu tersebut maka meningkat pula perasaan tanggungjawab aparatur desa dalam melakukan keputusan yang telah dihasilkan, Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* bahwa manajemen (*steward*) akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*) melalui kinerja organisasi. Saat *principal* ikut berkontribusi maka

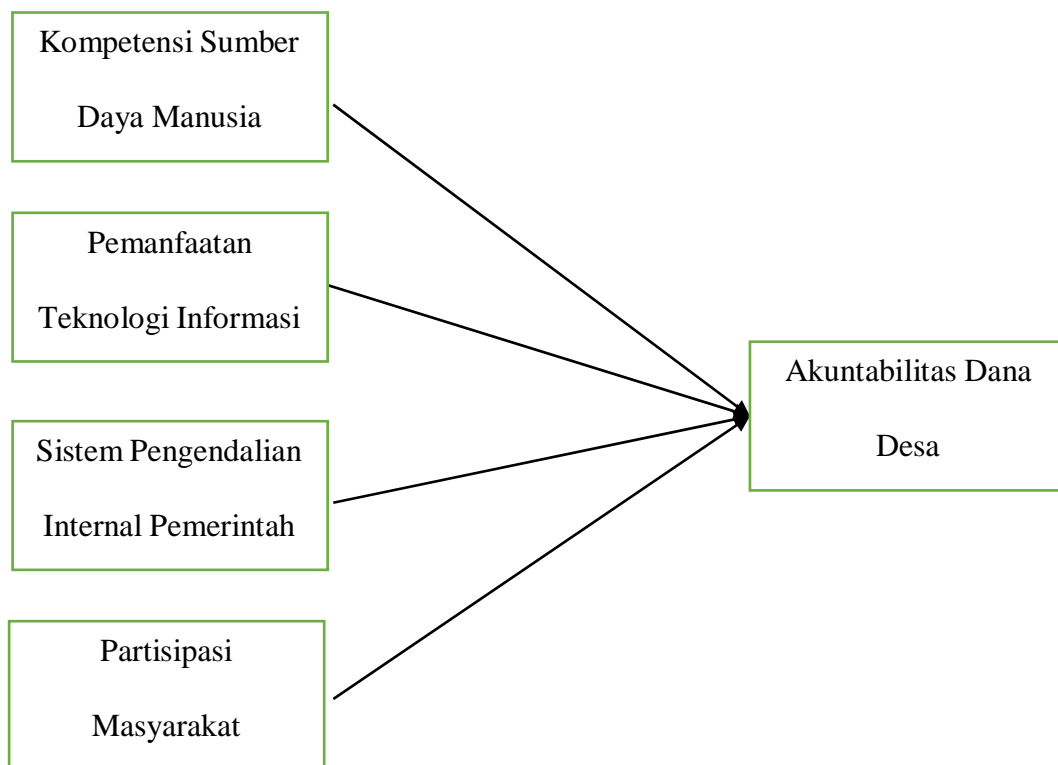
dapat ikut mengontrol kinerja pemerintah dengan upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Dalam lingkungan masyarakat dalam hal mengelola dana desa, ketika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka akan semakin tinggi juga pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu sesuai dengan penelitian I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi (2019), I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019), Ridha Fajri, Restu Agusti dan Julita (2021) dan Siti Umaira dan Adnan (2019) yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H₄: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptul penelitian menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga dari gambaran kerangka konseptual tersebut dapat diketahui mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang melakukan observasi yang dilakukan secara objektif agar dapat menyelesaikan permasalahan melalui beberapa proses yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data (Duli, 2019, p. 3). Dalam pendekatan ini data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik (A. Muri Yusuf, 2017).

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, mengendalikan dan memprediksi suatu gejala terhadap suatu korelasi antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki tiga orientasi hubungan yaitu hubungan kausal, simetris dan interaktif atau umpan balik (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini merujuk pada salah satu dari ketiga hubungan tersebut yaitu hubungan kausal dimana terdapat hubungan kausal pada variabel dependen dan variabel independen yang bersifat sebab akibat. Pada penelitian ini menerangkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat akan akuntabilitas dana desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dilaksanakannya penelitian ialah di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

3.3 Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bentuk kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu untuk dapat menunjang pekerjaan yang dilakukan.	Menurut Thoha (2008) ada tiga indikator yaitu : 1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) 2. Kemampuan (<i>Skill</i>) 3. Sikap (<i>Attitude</i>)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	Pemanfaatan teknologi informasi adalah kegiatan dalam menggunakan teknologi informasi untuk membantu kegiatan manusia.	Menurut Sari dkk (2017) ada tiga indikator yaitu : 1. Penggunaan Komputer 2. Jaringan Internet 3. Penggunaan Sistem
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_3)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah.	Menurut (PP No 60 Tahun 2008) ada lima indikator yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Internal
Partisipasi Masyarakat (X_4)	Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang	Menurut (Cohen dalam Naimah, 2017) ada empat indikator yaitu :

	berdampak pada tahapan evaluasi dan control kinerja pemerintah dengan upaya untuk dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang.	1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan 2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan 3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat 4. Partisipasi Dalam Evaluasi
Akuntabilitas Dana Desa (Y)	Akuntabilitas dana desa adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan kepada kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai pelaksanaan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	Menurut Mardiasmo (2002:21) dalam Andangatmadja (2012) ada empat indikator yaitu : 1. <i>Accountability For Probit and Legality</i> (Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum) 2. <i>Process Accountability</i> (Akuntabilitas Proses) 3. <i>Program Accountability</i> (Akuntabilitas Program) 4. <i>Policy Accountability</i> (Akuntabilitas Kebijakan)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Ada beberapa pengertian populasi dari para ahli diantaranya :

- Menurut Ismiyanto, “Populasi adalah wilayah yang terdiri dari subjek atau totalitas subjek yang dapat berupa orang, benda, sesuatu didalamnya yang dapat diperoleh informasi (data) penelitian.”
- Menurut Arikunto, “Populasi adalah semua objek penelitian. Apabila seorang peneliti ingin meneliti bagian dalam suatu wilayah maka itu disebut penelitian populasi.”

- c. Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Jadi dapat disimpulkan jika populasi adalah lokasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang memiliki syarat dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun populasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu aparatur desa, Ketua RW dan Ketua RT di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang berjumlah 70 orang.

3.4.2 Sampel

Ada beberapa pengertian sampel dari para ahli diantaranya :

- a. Menurut Arikunto, “Sampel adalah mewakili tempat yang diteliti. Jika yang akan kita teliti hanya setengah dari populasi , dapat disebutkan itu sampel.”
- b. Menurut Sudjana & Ibrahim, “Sampel adalah setengah dari populasi yang dapat dijangkau yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.”

Jadi dapat disimpulkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasi tersebut. Metode dalam pengumpulan sampel yang dipakai adalah teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel tidak secara acak melainkan didapat karena ada faktor yang sudah direncanakan (Fauzy, 2019). Jenis yang digunakan yaitu *saturation sampling*

atau sampel jenuh yang memiliki arti bahwa dalam pengambilan sampel keseluruhan dari populasi akan menjadi sampel. Namun pernyataan tersebut akan dilakukan apabila populasi memiliki jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 100 orang (Hidayat, 2017). Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 70 orang sesuai dengan populasi yang ada.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta – fakta yang dikumpulkan oleh peneliti. Jenis data dari penelitian ini adalah jenis data primer yaitu kuesioner serta data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban dana desa. Sumber data dari penelitian ini adalah para responden dan pihak aparat Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang paling penting. Dimana dalam tahap ini bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah dan mencari jawaban lalu menyimpulkan dari hipotesis yang telah dirumuskan (Aprilia Lindari, 2022). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis baik dalam bentuk tertulis di kertas ataupun di web kepada para responden yang telah ditentukan (Sugiyono, 2010).

Responden dalam penelitian ini adalah aparatu desa di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang berjumlah orang.

Tipe Angket tertutup akan digunakan pada penelitian ini. Pada angket tertutup responden hanya tinggal memilih jawaban yang telah disediakan (Siyoto & Sodik, 2015). Pada angket ini responden tidak memberikan jawaban atau respon alternatif selain yang telah disediakan peneliti. Pada penelitian ini akan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Skala likert adalah pengukuran yang bisa dipakai untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat individu mengenai suatu objek ataupun kejadian tertentu (Siregar, 2017). Dibawah ini adalah skor pilihan pada skala likert :

Tabel 3.2
Skala Likert

Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisis adalah proses pengolahan data dan informasi menjadi suatu proses penelitian, kemudian data tersebut dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Analisis data penelitian ini adalah kuantitatif, yang dinyatakan

dalam angka dan statistik, serta didukung oleh software *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 26 untuk pengolahan data. Metode analisis data penelitian terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah syarat uji yang harus dipenuhi pada penelitian dengan penggunaan pengambilan data menggunakan kuesioner dengan maksud agar nantinya data yang diperoleh ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Ada dua jenis uji kualitas data yaitu :

a. Uji Validitas

Menurut (Sugiarto & Sitinjak, 2006) uji validitas memiliki maksud untuk dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dipergunakan sesuai fungsinya. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sebuah kuesioner valid atau tidak. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika semua pertanyaan yang diajukan pada kuesioner dapat mengungkap hal yang diukur oleh kuesioner itu. Suatu tes validitas yang bernilai tinggi memiliki syarat tes tersebut memiliki hasil ukur yang tepat atau akurat.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar derajat tes secara konsisten yang diukur . Dalam uji reliabilitas dinyatakan dalam angka biasaya bentuknya koefisien.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki maksud untuk memberi penglihatan apakah dari sampel yang diambil ini berdistribusi normal atau tidak (Perdana, 2016). Dalam uji normalitas ada beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu Uji Chi Kuadrat, Uji Lilliefors, Uji kolgomorov-Smirnov dan dengan grafik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kolgomorov-smirnov untuk melihat data yang digunakan ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada uji kolgomorov-smirnov memiliki syarat yaitu :

- Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka sampel data itu berdistribusi normal.
- Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka sampel data itu tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah alat uji pada regresi untuk menemukan adanya hubungan atau tidak antara variabel independent. Jenis regresi yang baik sebaiknya tidak ada hubungan antara variabel independennya. Uji multikolinearitas dapat dijalankan dengan uji regresi menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance (Perdana, 2016). Untuk terbebas dari multikolinearitas ada syarat yang ada yaitu :

- Apabila nilai VIF ada di angka 1-10, maka antara variabel tidak ada multikolinearitas
- Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$, maka antara variabel tidak ada multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah alat uji pada regresi untuk menemukan perbedaan varian dan residual dari penelitian satu ke yang lain. Jika variance dan residual pada penelitian ke penelitian lain sama maka disebut Homokedastisitas, dan sebaliknya jika variance dan residual pada penelitian ke penelitian lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis berperan dalam menentukan adakah hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial maupun secara simultan. Ada empat uji hipotesis yang digunakan yaitu :

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan jenis regresi linier yang memiliki lebih dari satu variabel (Ghodang & Hantono, 2020). Analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan satu variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n). Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Packages for Social Science) untuk menganalisis data dalam penelitian. Model regresi penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Dana Desa

A = Konstanta

$b_1 - b_4$ = Koefisien Regresi

- X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
 X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
 X_3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 X_4 = Partisipasi Masyarakat
 e = *Error*

2. Uji Parsial (Uji T)

Menurut Imam Ghozali dan Ratmono (2013) uji t ini menunjukkan bahwa seberapa jauhnya satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengklaim bahwa variabel independen lainnya itu konstan. Dengan asumsi keputusan bahwa

- a. H_0 ditolak dan H_1 diterima, jika nilai signifikannya $< 0,05$
- b. H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika nilai signifikannya $> 0,05$

3. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Imam Ghozali dan Ratmono (2013) pada uji F ini akan menjelaskan apakah seluruh variabel independen yang diterapkan terdapat pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Menurut Kuncoro (2009) uji f digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada uji f ada beberapa proses diantaranya :

- a. Membuat hipotesis
 - H_0 = Semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

➤ H_1 = Semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Membuat ketetapan besarnya nilai signifikan yaitu 0,05

c. Membuat keputusan

➤ Ketika nilai signifikan $> 0,5$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

➤ Ketika nilai signifikan $< 0,5$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali dan Ratmono (2013) uji koefisien determinasi ditentukan untuk menilai sebagaimana kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil poin dari R^2 adalah antara angka 0 hingga 1. Ketika nilai R^2 kecil, maka kemampuan semua variabel independen dalam menggambarkan variabel dependennya terbatas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

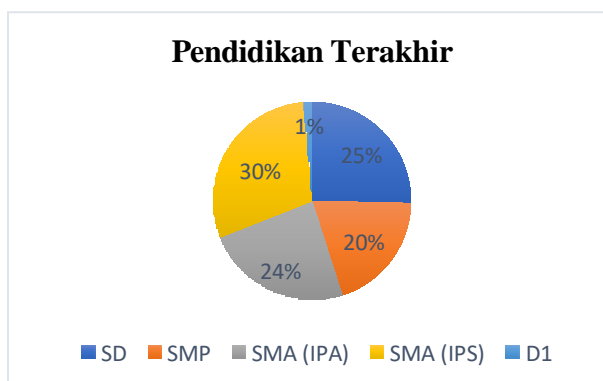
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memakai data primer yang didapat dengan lewat penyebaran kuesioner pada perangkat desa dan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Ketua RT dan Ketua RW yang berada di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

4.1.2 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah seluruh perangkat desa serta bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu RT dan RW yang ada di Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dimana diperoleh responden berjumlah 70 orang yang dijadikan sebagai sampel. Karakteristik responden disajikan dalam bentuk penggolongan seperti usia, lalu jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan serta masa kerja. Untuk penjelasan terkait hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

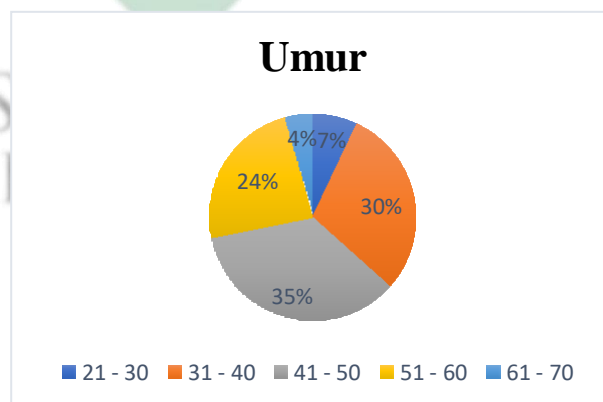


Sumber : Data Diolah, 2023

Gambar 4.1

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sesuai pada gambar dapat diketahui jika berdasarkan pendidikan terakhir responden pada penelitian ini menyatakan jika responden yang pendidikan terakhirnya SMA jurusan IPS 30% atau 21 responden. Dari 21 responden tersebut 12 diantaranya merupakan aparatur desa.



Sumber : Data Diolah, 2023

Gambar 4.2

Responden Berdasarkan Usia

Sesuai pada gambar dapat diketahui jika berdasarkan umur responden pada penelitian ini menyatakan jika responden yang persentasenya paling tinggi yaitu umur 41 – 50 Tahun yaitu 35% atau 25 responden.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dengan penggunaan analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai dari mean, median, standar deviasi, nilai minimum serta nilai maksimum yang dimiliki oleh setiap variabel. Penelitian ini menggunakan variabel diantaranya Akuntabilitas Dana Desa (ADD) sebagai variabel dependen serta Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Partisipasi Masyarakat (PM) sebagai variabel independen. Dibawah ini adalah hasil dari analisis deskriptif yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

VARIABEL	N	MEAN	MEDIAN	MIN	MAX	STD.DEV
KSDM	70	41,01	41,00	33,00	45,00	2,89674
PTI	70	31,91	33,00	25,00	35,00	3,001
SPIP	70	57,68	57,00	50,00	65,00	3,325
PM	70	35,91	35,50	28,00	40,00	3,809
ADD	70	43,81	44,00	37,00	50,00	3,380

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menyatakan informasi data dari masing – masing variabel penelitian , yaitu :

1. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 45, nilai mean sebesar 41,01, nilai median sebesar 41,00 dan nilai standar deviasi sebesar 2,89674 dengan N sebanyak 70 data.
2. Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35, nilai mean sebesar 31,91, nilai median sebesar 33,00 dan nilai standar deviasi sebesar 3,001 dengan N sebanyak 70 data.
3. Pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 50, nilai maksimum sebesar 65, nilai mean sebesar 57,68, nilai median sebesar 57,00 dan nilai standar deviasi sebesar 3,325 dengan N sebanyak 70 data.
4. Pada variabel partisipasi masyarakat (PM) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 40, nilai mean sebesar 35,91, nilai median sebesar 35,50 dan nilai standar deviasinya 3,809 dengan N sebanyak 70 data.
5. Pada variabel akuntabilitas dana desa (ADD) menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 37, nilai maksimum sebesar 50, nilai mean sebesar 43,81, nilai median sebesar 44,00 dan nilai standar deviasinya sebesar 3,380 dengan N sebanyak 70 data.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas perlu ditempuh dalam rangka untuk dapat mengukur valid atau tidaknya suatu alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang dimaksudkan disini adalah pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Terdapat lima variabel yang di uji validitasnya dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian internal pemerintah (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan akuntabilitas dana desa (Y). Dalam uji validitas bisa diamati dengan menyesuaikan aturan yang ada bahwa nilai r hitung $>$ nilai r tabel untuk dapat menentukan valid tidaknya kuesioner tersebut. Sebelum dapat menentukannya, perlunya untuk mencari nilai r tabelnya terlebih dahulu. Pada penelitian ini ada 70 responden. Dalam mencari nilai r tabelnya dengan menggunakan rumus $df = N-2$ jadi $70-2 = 68$, sehingga r tabelnya yaitu 0,2352. Dibawah ini adalah hasil pengujian validitas yang telah dilakukan dan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas

INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
X1.1	0,496	0,2352	VALID

X1.2	0,561	0,2352	VALID
X1.3	0,455	0,2352	VALID
X1.4	0,359	0,2352	VALID
X1.5	0,654	0,2352	VALID
X1.6	0,497	0,2352	VALID
X1.7	0,735	0,2352	VALID
X1.8	0,522	0,2352	VALID
X1.9	0,384	0,2352	VALID
X2.1	0,702	0,2352	VALID
X2.2	0,694	0,2352	VALID
X2.3	0,639	0,2352	VALID
X2.4	0,543	0,2352	VALID
X2.5	0,581	0,2352	VALID
X2.6	0,760	0,2352	VALID
X2.7	0,674	0,2352	VALID
X3.1	0,251	0,2352	VALID
X3.2	0,503	0,2352	VALID
X3.3	0,412	0,2352	VALID
X3.4	0,267	0,2352	VALID
X3.5	0,274	0,2352	VALID
X3.6	0,473	0,2352	VALID
X3.7	0,369	0,2352	VALID
X3.8	0,478	0,2352	VALID
X3.9	0,529	0,2352	VALID
X3.10	0,517	0,2352	VALID
X3.11	0,519	0,2352	VALID
X3.12	0,537	0,2352	VALID
X3.13	0,427	0,2352	VALID
X4.1	0,692	0,2352	VALID
X4.2	0,563	0,2352	VALID
X4.3	0,805	0,2352	VALID
X4.4	0,749	0,2352	VALID
X4.5	0,763	0,2352	VALID
X4.6	0,689	0,2352	VALID
X4.7	0,771	0,2352	VALID
X4.8	0,822	0,2352	VALID
Y1.1	0,638	0,2352	VALID
Y1.2	0,516	0,2352	VALID
Y1.3	0,526	0,2352	VALID
Y1.4	0,630	0,2352	VALID
Y1.5	0,320	0,2352	VALID
Y1.6	0,456	0,2352	VALID

Y1.7	0,642	0,2352	VALID
Y1.8	0,650	0,2352	VALID
Y1.9	0,540	0,2352	VALID
Y1.10	0,537	0,2352	VALID

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan pada seluruh variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian internal pemerintah (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan akuntabilitas dana desa (Y) dikatakan valid. Hal tersebut karena memenuhi aturan bahwa nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel. Dimana semua item pertanyaan pada variabel nilai r hitung nya lebih besar dari dari 0,2352 yang merupakan nilai r tabel nya.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk dapat menilai konsistensi pada isi hasil dari penelitian. Dimana uji ini untuk menimbang konsisten atau tidak konsistennya kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dikerjakan dengan memakai rumus "*Cronbach's Alpha*". Dengan dasar pengambilan keputusan sesuai "*Cronbach's Alpha*" yaitu jika nilai *cronbach's alpha* variabel $>$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Dibawah ini adalah hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan pada seluruh variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
KSDM	0,638
PTI	0,767
SPIP	0,620
PM	0,846
ADD	0,727

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel diatas menampilkan bahwa variabel KSDM mempunyai nilai *cronbach's alpha* $0,638 > 0,60$, variabel PTI memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,767 > 0,60$, variabel SPIP memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,620 > 0,60$, variabel PM memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,846 > 0,60$ dan variabel ADD memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,727 > 0,60$. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan sebelumnya, nilai *cronbach's alpha* seluruh variabel $> 0,60$, maka seluruh pernyataan dalam variabel dinyatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk dapat mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik *kolmogorov smirnov*. Keabsahan dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah apabila nilai

probabilitas $> 0,05$, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,2
------------------------	-----

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ yaitu $0,2 > 0,05$. Sehingga nilai residualnya dinyatakan berdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Penggunaan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antara setiap variabel penelitian (Ghozali, 2016). Model regresi dapat ditandakan baik ketika tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya sehingga dikatakan terbebas dari multikolinearitas, Aturan dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu didasarkan pada *tolerance* dan *Variance Inflator Factor* (VIF). Apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dikatakan tidak mengalami multikolinearitas. kebalikannya apabila nilai toleransi $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka dikatakan mengalami multikolinearitas.

Tabel 4.5**Hasil Uji Multikolinearitas**

MODEL	COLLINEARITY STATISTICS	
	TOLERANCE	VIF
KSDM	0,819	1,221
PTI	0,679	1,473
SPIP	0,859	1,164
PM	0,752	1,330

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa variabel KSDM memperoleh nilai VIF sebesar $1,221 < 10$ dan nilai toleransi $0,819 > 0,10$, variabel PTI memperoleh nilai VIF sebesar $1,473 < 10$ dan nilai toleransi $0,679 > 0,10$, variabel SPIP memperoleh nilai VIF sebesar $1,164 < 10$ dan nilai toleransi $0,859 > 0,10$, variabel PM memperoleh nilai VIF sebesar $1,330 < 10$ dan nilai toleransi $0,752 > 0,10$. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa nilai VIF dan nilai toleransi seluruh variabel independen memenuhi aturan, maka seluruh variabel independent tidak mengalami multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan memiliki tujuan untuk menguji pada setiap variabel yang ada dalam penelitian mengalami ketidaksamaan variabel independen dari residual dalam persamaan model regresi linier (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk

mendeteksi terjadi atau tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig
KSDM	0,341
PTI	0,553
SPIP	0,657
PM	0,060

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan uji heterokedastisitas pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa variabel KSDM memiliki nilai signifikansi $0,341 > 0,05$, variabel PTI memiliki nilai signifikansi $0,553 > 0,05$, variabel SPIP memiliki nilai signifikansi $0,657 > 0,05$ dan variabel PM memiliki nilai signifikansi $0,060 > 0,05$. Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa nilai signifikan seluruh variabel independen $> 0,05$, maka seluruh variabel independen tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penggunaan regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Suyono, 2015). Pada penelitian ini terdapat kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian internal pemerintah (X3), partisipasi Masyarakat (X4) yang berperan sebagai variabel independen dan akuntabilitas dana desa sebagai variabel dependen.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

MODEL	UNSTANDARDIZED B	STD.ERROR
<i>Constant</i>	5,314	7,307
KSDM (X1)	0,466	0,119
PTI (X2)	-0,254	0,127
SPIP (X3)	0,359	0,102
PM (X4)	0.189	0,095

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 4.11 diatas, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$ADD = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$ADD = 5,314 + 0,466 X_1 - 0,254 X_2 + 0,359 X_3 + 0,189 X_4 + e$$

Berdasarkan hasil persamaa regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta adalah 5,314, yang menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat nilainya nol, maka nilai akuntabilitas dana desa yang terjadi adalah 5,314.
2. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia (KSDM) sebesar 0,466, berarti kompetensi sumber daya manusia (KSDM) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (ADD). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan KSDM, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan peningkatan nilai akuntabilitas dana desa (ADD) sebesar 0,466.
3. Nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi (PTI) sebesar -0,254, berarti pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas dana desa (ADD). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan PTI, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan penurunan nilai akuntabilitas dana desa (ADD) sebesar -0,254.

4. Nilai koefisien sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebesar 0,359, berarti sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (ADD). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan SPIP, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan peningkatan nilai akuntabilitas dana desa (ADD) sebesar 0,359.
5. Nilai koefisien partisipasi masyarakat (PM) sebesar 0,189, berarti partisipasi masyarakat (PM) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (ADD). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan PM, dengan asumsi semua variabel lainnya konstan, maka mengakibatkan peningkatan nilai akuntabilitas dana desa (ADD) sebesar 0,189.

4.2.4.2 Uji Parsial(Uji T)

Pengujian ini dilakukan bermaksud untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu apabila nilai sign $< 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai sign $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga hipotesis ditolak.. Dibawah ini adalah hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.8**Hasil Uji T**

VARIABEL	SIG
KSDM	0,000
PTI	0,049
SPIP	0,001
PM	0,050

Sumber : Hasil Output SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, menunjukkan hasil uji t sebagai berikut :

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM) mempunyai nilai siginifikansi 0,000. Nilai signifkansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Selain itu nilai koefisien diketahui sebesar 0,466. Dengan demikian

H_1 penelitian ini diterima, yaitu kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) mempunyai nilai signifkansi 0,049. Nilai signifkansi 0,049 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 ($0,049 < 0,05$). Namun, nilai koefisien diketahui sebesar -0,254. Dengan demikian H_2 penelitian ini ditolak, yaitu pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh secara negatif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

3. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) mempunyai nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 ($0,001 < 0,05$). Selain itu nilai t hitung nya diketahui sebesar 0,359. Dengan demikian H_3 penelitian ini diterima, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini menunjukkan
4. Variabel partisipasi masyarakat (PM) memiliki nilai signifikansi 0,050. Nilai signifikansi 0,050 sama dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 ($0,050 \leq 0,05$). Selain itu nilai koefisien diketahui sebesar 0,189. Dengan demikian H_4 penelitian ini diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

4.2.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan bermaksud untuk untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersama – sama yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat akan akuntabilitas dana desa. Aturan pemungutan

keputusan dalam uji f yaitu apabila nilai $\text{sig} < 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel dependen. Dibawah ini adalah hasil uji f sebagai berikut :

Tabel 4.9

Hasil Uji F

MODEL	F	SIG
Regression	12,904	0,001

Sumber : Hasil Ouput SPSS 29, 2023

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat secara simultan atau bersamaan berpengaruh secara signifikan akan akuntabilitas dana desa.

4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel indepen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi bernilai antar 0 – 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik.

Tabel 4.10**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Adjusted R Square	0,408
-------------------	-------

Sumber : Hasil Output SPSS 29, 2023

Dalam hasil uji yang dilakukan pada tabel 4.14 diatas dapat diketahui nilai pada adjusted r square senilai 0,408 atau sebesar 40,8%. Maka dapat diketahui jika kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat menerangkan akuntabilitas dana desa sebesar 40,8%. Sementara itu sisanya sebesar 59,2% (100% - 40,8%) dipengaruhi oleh variabel – variabel lain di luar model penelitian ini.

4.3 Pembahasan**4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji t bahwasannya nilai signifikansi variabel KSDM lebih kecil yaitu $0,000 < 0,05$. Dan juga diperoleh nilai koefisien pada hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil positif sebesar 0,466, sehingga dapat diambil kesimpulan rumusan pada hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Aziiz & Prastiti, 2019), (Marlina et al., 2021), (Bawono et al., 2020), (Fajri & Julita, 2021) dan (Umaira & Adnan, 2019) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Namun, tidak mendukung hasil penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi sumber daya manusia adalah potensi seorang individu terdapat pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya. Hasil penelitian ini juga mendukung teori *stewardship* yang mengutarakan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh atas akuntabilitas dana desa karena sumber daya manusia disini yaitu aparatur desa yang bertindak sebagai steward akan mengelola dan mengalokasikan dana desa setara dengan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan akhirnya dapat meningkatkan pertanggungjawaban kepada principal yaitu masyarakat sebagai pemilik dana. Teori *stewardship* sesuai penelitian ini dideskripsikan pada kondisi dimana para *steward* (aparatur desa) tidak memiliki keperluan pribadi tetapi mengutamakan mementingkan keperluan *principal* (pemilik). Pemahaman teori *stewardship* bahwa manajer pada suatu organisasi akan berkelakuan sesuai keperluan bersama. Saat keperluan pemilik dan manajemen ada perbedaan, maka manajemen hendak berjuang untuk menyelaraskan dan

berkelakuan berdasarkan perangai pemilik. Karena hal tersebut berdasarkan pada peninjauan yang rasional dan juga dapat menggapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kendala yang masih dihadapi pemerintah Desa Pronojiwo yaitu antara lain masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di desa meningkat pendidikan terakhir aparatnya rata – rata adalah SMA sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program/kegiatan dan berdampak pada pelaporan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur melalui adanya pelatihan, pembinaan, pengawasan, monitoring kinerja tentang pengelolaan dana desa secara berkala yang diadakan pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dengan pengelolaan dana desa. Karena pengetahuan khusus terutama tentang pengelolaan keuangan dana desa harus benar-benar dipahami sehingga keuangan desa dapat terkelola dengan baik.

Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa adalah dalam laporan pertanggungjawaban. Ketika dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pihak aparatur desa yang kemampuannya rendah atau masih minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa maka laporan yang dihasilkan bisa saja dimanipulasi atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi . Namun, ketika kompetensi aparatur desa yang memadai dapat mendorong aparatur desa

untuk memahami cara pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan kejadian sebenarnya, berkualitas, mudah dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dengan demikian semakin tinggi kemampuan intelektual seorang aparat desa tentunya orang tersebut akan lebih memahami pengetahuan, aturan, pola atau format tertentu dalam laporan yang sudah dibakukan, sehingga akuntabilitas pada pengelolaan dana desa juga akan meningkat.

4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis penelitian menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji t bahwasannya nilai signifikansi variabel PTI lebih kecil yaitu $0,046 < 0,05$.

Dan juga diperoleh nilai koefisien pada hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil negatif sebesar -0,254. Arah negatif berarti bertambah tingginya pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan turunnya akuntabilitas dana desa dan juga sebaliknya semakin rendah pemanfaatan teknologi informasi maka menyebabkan meningkatnya akuntabilitas dana desa. Sehingga diambil kesimpulan rumusan pada hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Aziiz & Prastiti, 2019) dan (Marlina et al., 2021) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Namun tidak mendukung hasil penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) yang memaparkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini menolak teori *stewardship*, dimana dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memuat untuk terealisasinya prinsip pemerintah yang baik (*Good Governance*) dengan bentuk perealisasi pembangunan yang sejalan dengan prinsip tersebut, baik pemerintah daerah maupun pusat memiliki kewajiban adanya perkembangan dalam pembuatan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Pada penelitian ini menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan pada akuntabilitas dana desa. Faktor yang melatarbelakangi yaitu pembuatan laporan pertanggungjawaban sudah secara online menggunakan aplikasi siskeudes yang membantu kinerja aparat desa. Selain itu bentuk laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Pronojiwo secara offline dalam bentuk fisik sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana isinya lengkap mulai dari rincian pemasukan dan pengeluaran dana desa serta berbagai bukti yang mendukung seperti cek, nota dalam pengadaan barang serta jasa dan adanya foto setiap kegiatan yang berlangsung.

Selain itu, temuan dalam penelitian ini menyatakan arah pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa itu negatif. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien yang bernilai negatif pada hasil analisis regresi linier berganda. Arah negatif ini dilatarbelakangi menurunnya penggunaan ketiga indikator dalam penelitian ini yaitu komputer, jaringan internet dan penggunaan sistem.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di akhir tahun 2021 adanya erupsi Gunung Semeru yang berdampak pada daerah sekitar gunung berada yaitu di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Akibat dari erupsi Gunung Semeru yang paling besar yaitu putusnya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang bagian perkotaan dan Kabupaten Malang. Akibat lain yang ditimbulkan yaitu terjadinya kerusakan aliran listrik yang menyebabkan listrik mati. Dengan adanya kejadian tersebut alternatif yang dibuat pemerintah yaitu untuk sementara aliran listrik di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang disambungkan dengan listrik Kabupaten Malang. Hal tersebut berlangsung dari awal tahun 2022 hingga sekarang 2023, mengingat pada akhir tahun 2022 kemarin Gunung Semeru kembali mengalami erupsi. Alternatif yang dibuat pemerintah sangat efektif dengan melihat kondisi di lapangan. Namun, ternyata hal tersebut menimbulkan masalah baru yaitu masih sering terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Pronojiwo yang intensitasnya lumayan sering. Belum dapat dipastikan kapan kondisi listrik bisa kembali normal seperti semula.

Akibat fenomena diatas menyebabkan terkendalanya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa mengingat ketiga indikator yang digunakan saling berkaitan. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban diperlukan komputer untuk media penginputan data yang dalam pengoperasiannya diperlukan listrik untuk penggunaannya, selain itu dalam penginputan laporan pertanggungjawaban secara online melalui aplikasi siskeudes diperlukan adanya jaringan internet yang memadai dalam pengaksesannya sedangkan jaringan internet yang ada tidak stabil dan mumpuni. Hal tersebut menyebabkan penggunaan aplikasi siskeudes belum dapat maksimal. Ketidakmaksimalan ketiga indikator pemanfaatan teknologi informasi ini diakibatkan fenomena yang terjadi yaitu masalah pemadaman listrik yang terjadi disaat jam operasional kantor Desa Pronojiwo.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji t bahwasannya nilai signifikansi variabel SPIP lebih kecil yaitu $0,001 < 0,05$. Dan juga diperoleh nilai koefisien pada hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil positif sebesar 0,359. Arah positif berarti semakin besar sistem pengendalian internal pemerintah akan menyebabkan peningkatan

akuntabilitas dana desa. Sehingga dapat disimpulkan rumusan pada hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Yesinia et al., 2018), (Aziiz & Prastiti, 2019) dan (Arfiansyah, 2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Temuan dari penelitian ini mendukung teori *stewardship*, dimana penerapan SPIP bertujuan untuk memperoleh tujuan organisasi dengan berdasar pada kepentingan rakyat. Sistem pengendalian intern pemerintah membagikan kepercayaan yang layak dalam proses terselenggaranya pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yang berdasar pada perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas.

Dalam setiap lapisan pemerintahan baik itu pemerintahan pusat ataupun daerah berkewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, melalui berpegang pada sistem pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Setiap kegiatan yang dilakukan harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan pembuatan rencana, pelaksanaannya, kontrol sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberi kepercayaan yang memuaskan bahwa terselenggaranya kegiatan

tersebut bisa menggapai sasaran secara efektif dengan cara membuat laporan pengelolaan dana desa yang handal, melindungi asset dan berperilaku patuh terhadap aturan yang berlaku.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan SPIP agar dapat berjalan dengan baik adalah dengan dibuatnya regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Lumajang No 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada PP No 60 Tahun 2008 (Peraturan Bupati Lumajang, 2010). Upaya tersebut sudah mendapatkan hasil yang diharapkan. Meski begitu, upaya tersebut tetap harus ditingkatkan dan dijaga secara konsisten agar dapat berjalan secara terus – menerus. Dengan adanya peraturan bupati yang mengatur adanya pelaksanaan SPIP, peingimplementasian SPIP dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Desa Pronojiwo telah menerapkan unsur – unsur dalam pengendalian intern yang dilakukan berjenjang dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dimulai dari :

1. Pimpinan pemerintah desa menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan perilaku positif dan kondusif dalam implementasi sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Bentuk lingkungan pengendaliannya yaitu bentuk kepemimpinan yang kondusif, adanya kebijakan pengembangan SDM dalam rangka pengelolaan dana desa dan pendelegasian tugas kepada individu yang tepat.
2. Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi yang ditetapkan. Resiko yang telah diidentifikasi yaitu program desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, risiko kecurangan akan pengadaan barang atau jasa dan pungutan liar pada layanan desa.
3. Adanya penerapan kegiatan pengendalian yang baik melalui kebijakan dan mekanisme pengendalian. Kegiatan pengendalian ini berfungsi untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bentuk kegiatan pengendaliannya yaitu diadakannya musyawarah mufakat dengan masyarakat mengenai program desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, setiap adanya transaksi mengenai hal yang berhubungan dengan penggunaan dana desa diperlukannya bukti nyata berupa kuitansi atau sejenisnya yang sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya dan setiap adanya kejadian pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan oleh instansi dapat dilaporkan kepada

pimpinan pemerintah desa ataupun BPD sebagai pihak yang mengawasi proses pengendalian di pemerintah desa.

4. Menginformasikan laporan dalam bentuk dan waktu yang tepat sesuai keterjadiannya.
5. Melakukan pemantauan terus menerus yaitu pemantauan proses kegiatan sehari-hari dan evaluasi berkala terkait penyelenggaraan SPIP.

4.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis penelitian memperlihatkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Masalah ini dapat dibuktikan melalui uji t bahwasannya nilai signifikansi variabel PM sama yaitu $0,05 \leq 0,05$. Dan juga diperoleh nilai koefisien pada hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil positif sebesar 0,189, sehingga dapat disimpulkan rumusan pada hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Julianto & Dewi, 2019), (Putra & Rasmini, 2019) dan (Fajri & Julita, 2021) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Namun, tidak mendukung hasil penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Hakim et al., 2022) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Temuan dari penelitian ini mendukung teori *stewardship* dimana saat principal (masyarakat) ikut berkontribusi dalam pengelolaan dana desa, maka

penggunaan dan pengelolaan dana desa ini dapat tepat sasaran dan manfaat yang diberikan akan lebih sesuai dengan realita kepentingan masyarakat.

Selain itu dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di akhir tahun 2022 yaitu adanya Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang yaitu Ahmad Hendra Jaka Kumbara yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020 hingga 2021 untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 535 Juta (Huda, 2022). Dengan adanya fenomena tersebut adanya keterlibatan masyarakat juga dapat ikut mengontrol dan mengawasi pengelolaan anggaran desa dengan upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Selaras dengan hasil penelitian

Temuan dalam penelitian ini adalah bentuk keterlibatan masyarakat di Desa Pronojiwo ditunjukkan dengan saat akan merencanakan program – program pembangunan desa aparat desa akan mengadakan kegiatan pertemuan atau musyawarah lingkungan masyarakat tentang rencana pembangunan desa dalam satu periode. Dalam kegiatan pertemuan tersebut masyarakat ikut memberikan pendapat berupa sumbangan ide tentang program desa yang akan dijalankan. Dalam pelaksanaan masyarakat juga terlibat mengawasi perkembangan proses pembangunan program desa, dan ikut memanfaatkan serta merawat hasil pembangunan program – program desa. Selain itu di setiap akhir periode adanya evaluasi terkait hasil program desa yang telah dicapai.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat pada saat proses pembuatan rencana, pelaksanaannya, ikut mengontrol saat proses pembangunan program desa hingga akhirnya pengevaluasian diharapkan dapat menumbuhkan integritas pribadi aparat desa dalam Menyusun pertanggungjawaban keyakinan yang disampaikan masyarakat perihal akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dan transparan. Selaras dengan hasil penelitian (Umaira & Adnan, 2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, Sehingga ketika tingkat partisipasi masyarakat meningkat dalam pengelolaan dana desa tersebut juga akan menambah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil ini mendukung teori stewardship, yang menyatakan steward (manajemen) akan berbuat berdasarkan kepentingan principal (masyarakat) sebagai pemilik dana. Hal ini menunjukkan dengan tingginya kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu aparatur desa sebagai pihak yang mengelola dana desa akan membuat tinggi nya juga akuntabilitas akan pengelolaan dana desa. Latar belakang pendidikan aparatur desa di Desa Pronojiwo yaitu rata – rata SMA jurusan IPS. Untuk dapat meningkatkan kompetensinya dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa yang baik melalui pelatihan tentang pengelolaan dana desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil ini mendukung teori stewardship, yang menyatakan adanya teknologi informasi menolong aparatur desa dalam membuat laporan terkait pengelolaan dana desa sehingga akan meningkatnya

akuntabilitasnya. Namun arah pada penelitian ini yaitu negatif. Faktornya yaitu adanya kejadian erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan listrik di Desa Pronojiwo dialihkan ke Kabupaten Malang. Sehingga listrik yang didapat tidak dapat maksimal terbukti sering adanya pemadaman listrik disaat jam aktif operasional Kantor Desa Pronojiwo. Sehingga membuat kurang maksimalnya penggunaan aplikasi siskeudes yang membutuhkan jaringan internet yang stabil. Hal tersebut juga dibuktikan rendahnya nilai indikator jaringan internet pada variabel pemanfaatan teknologi informasi.

3. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil ini mendukung teori stewardship, yang menyatakan penggunaan SPIP adalah untuk menggapai tujuan organisasi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan SPIP dalam suatu organisasi pemerintahan berguna untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan dana desa ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Desa Pronojiwo telah menerapkan lima unsur dari SPIP dimulai dari pimpinan pemerintah desa menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai, serta mengidentifikasi resiko dalam lingkungan kerja seperti program desa yang akan dijalankan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dari hal tersebut maka perlunya penerapan kegiatan pengendalian dari resiko yang telah diidentifikasi yaitu diadakannya musyawarah dengan masyarakat terkait penyusunan program desa yang akan dijalankan, dalam penginformasian laporan sudah berdasarkan waktu dan sesuai dengan kejadian

sebenarnya, dan terakhir selalu adanya pemantauan terus – menerus dalam kegiatan sehari – hari sekaligus evaluasi dalam setiap akhir periode terkait penyelenggaraan SPIP.

4. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil ini mendukung teori stewardship, yang menyatakan bentuk keterlibatan masyarakat ketika mengelola dana desa dari awal proses pembuatan rencana hingga pertanggungjawaban. Masyarakat dapat ikut mengontrol progress pengelolaan dana desa dalam bentuk program – program pembangunan desa yang sebelumnya telah disepakai bersama sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat juga bisa ikut mengawasi pengelolaan dana desa kemudian hal tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Maka dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat saran yang ingin disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan variabel yang lebih variatif dalam mengukur akuntabilitas dana desa. Selain itu lokasi objek penelitian juga dapat ke daerah lain dan jangkauannya lebih luas.
2. Bagi perangkat desa disarankan untuk tetap meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Dan juga hasil baik variabel independen yang diukur

dalam penelitian ini tetap konsisten dijalankan. Selain itu dapat juga meningkatkan latar pendidikan aparatnya untuk menyetarakan ke SMP atau SMA melalui program kejar paket.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang diharapkan dapat memaksimalkan perbaikan terkait aliran listrik di Kecamatan Pronojiwo.
4. Bagi masyarakat desa disarankan untuk konsisten berpartisipasi dalam setiap musyawarah terkait program – program desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. (2017). Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan (1 cetakan 4). Kencana.
- Aprilia Lindari, I. (2022). Pengaruh Rekrutmen dan Desain Pekerjaan Terhadap Prestasi Kerja Kementerian Agama Kabupaten Jombang.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Aritonang, D. M. (2015). Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–28.
- Aswir, & Misbah, H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (Vol. 2, Issue 1).
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3).
<https://doi.org/10.18196/jai.2103160>

- BKT, R. K. (2020). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. DJPB. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Peraturan Bupati Lumajang, (2010).
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In *Molecules* (Vol. 9, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Geffenberger, K. (1967). Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue 1991).
- Ghodang, H., & Hantono. (2020). *Metologi Penelitian Kuantitatif (Konsep Dasar dan Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur Dengan SPSS* (V. Ghodang (ed.)). PT Penerbit Mitra Grub.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L., Agustan, T. J., & Rangkuti, S. (2022). Analysis Of Factors Affecting Village Financial Accountability. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 085–102. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.44194>
- Hidayat, A. (2017). Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap Serta Jenisnya). <https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html>

- Huda, M. (2022). *Diduga Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kades Lumajang Ditahan*. Kompas. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/184231578/diduga-korupsi-dana-desa-rp-500-juta-kades-di-lumajang-ditahan>
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 282–293. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/774>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Krismanji, & Aryani, Y. A. (2014). *Akuntansi Manajemen* (3rd ed.). STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Mulyana. (2006). Pengaruh penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1–13.
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia* (UNDP).

- Nuswantoro, B. D. (2023). Mengenal Siskeudes: Aplikasi Pembantu Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.wargadesa.com/profil/7907944255/mengenal-siskeudes-aplikasi-pembantu-pengelolaan-keuangan-desa>
- Oktavianus Pasaloran. (2001). Teori Stewardship : Tinjauan konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 9, Issue 2, pp. 1–14).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2008).
- Perdana, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22 (Christianingrum (ed.); 1st ed.). LAB KOM MANEJEMN FE UBB.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Sasongko, D. (2022). Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Kades di Lumajang Ditahan Jaksa. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-kades-di-lumajang-ditahan-jaksa.html>
- Siregar, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (4th ed.). Kencana.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia,

- Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580–590.
<https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?page=3&id=6015144&view=documentsgs>
- Sugiarto, & Sitinjak, T. J. (2006). LISREL. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Suarweni,
- V. W. (2015). Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*.
- Sunarti, N. (2014). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. 171(6), 727–735.
<https://ejournal.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Suyono. (2015). Analisis Regresi Untuk Penelitian (1st ed.). Deepublish.
- Syamsyudin, A. (2008). *Partisipasi*. Pustaka Pelajar Stein.
- T.M, F. F., Hardianto, W. T., & Rifa'i, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas. *Journal Of Public Administration and Sociology of Development*, 2(1), 1–19.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Vincek, W. C., Aldrich, C. S., Borchardt, R. T., & Grunewald, G. L. (1981). Pengantar Teknologi Infomasi.

Widjaja, H. A. . (2008). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Rajawali Pers.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokas Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>

